LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 47/PMK.010/2018
TENTANG : PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBAYARAN *RECURRENT COST* SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN)

LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN KREDIT PAJAK
PENGHASILAN DARI *RECURRENT COST*
SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN)

Nama Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Tahun Pajak : 2018

No	Keterangan		Rupiah
I.	Penghasilan dari *recurrent* cost SPAN	(3)	
II.	Biaya untuk memperoleh penghasilan dari *recurrent cost* SPAN	(4)	
III.	Penghasilan Kena Pajak dari *recurrent cost* SPAN	(5)	
IV.	PPh Terutang dari *recurrent cost* SPAN	(6)	
V.	PPh Pasal 23 yang telah dipotong dari *recurrent cost* SPAN	(7)	
VI.	PPh Kurang / Lebih Bayar	(8)	
VII.	PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan pada SPT Tahunan	(9)	

....., ... 2018 (10)
..... (11)

(12)

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK
PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Diisi dengan jumlah penghasilan yang berasal dari pembayaran *recurrent cost* SPAN;
4. Diisi dengan jumlah biaya untuk memperoleh penghasilan yang berasal dari pembayaran *recurrent cost* SPAN;
5. Diisi dengan jumlah pengurangan (I) - (II);
6. Diisi dengan hasil perkalian tarif Pajak Penghasilan sesuai Pasal 17 atau Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dengan jumlah (III);
7. Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong atas pembayaran *recurrent cost* SPAN;
8. Diisi dengan selisih (IV) - (V);
9. a. Diisi dengan nilai (V) dalam hal (V) lebih kecil dari (IV), atau
   b. Diisi dengan nilai (IV) dalam hal (V) lebih besar dari (IV);
10. Diisi dengan nama kota, tanggal dan bulan surat;
11. Diisi dengan jabatan penandatangan;
12. Diisi dengan tanda tangan dan cap perusahaan;
13. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampirkan surat kuasa bermeterai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001